

DILEMA PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS PADA SISWA

Dinda Tri Ayuni¹

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ARTICLE INFO

Article history:

Received Mei, 2025

Revised Mei, 2025

Accepted Mei, 2025

Available Mei, 2025

Email: ayunidindar@gmail.com¹



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstract

Nutritional problems in Indonesia are still a major challenge, especially in children and adolescents. Nutritional fulfillment through quality and adequate food intake plays an important role in shaping productive and superior human resources. The Free Nutritious Meal Program is a program designed to provide nutritious food to support children's health and education. The purpose of this study is to determine the success or failure obtained from the MBG program so that it becomes a consideration in the sustainability of the program implementation. The method used is a literature study or literature study. The results show that this program has the potential to increase student attendance, improve student focus in learning, and reduce the economic burden on families.

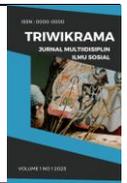
However, there are still various obstacles, such as policy mismatches, suboptimal planning and resources, many problems in the implementation process, and the resulting impact on the state and society. The program, which was initially expected to be an effective solution, has faced serious problems. This not only undermines the government's credibility, but also prolongs the malnutrition problem that should have been resolved. Thus, a strong policy strategy is needed to ensure the effectiveness and sustainability of the program.

Keywords: Free Nutritious Meal Program, Policy Implementation, Students

Abstrak

Permasalahan gizi di Indonesia masih menjadi tantangan besar, terutama pada anak-anak dan remaja. Pemenuhan gizi melalui asupan makanan yang berkualitas dan mencukupi berperan penting dalam membentuk sumber daya manusia yang produktif dan unggul. Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang dirancang sebagai upaya untuk memberikan makanan bergizi guna menunjang kesehatan dan pendidikan anak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan yang diperoleh dari program MBG agar menjadi suatu pertimbangan dalam keberlanjutan pelaksanaan program tersebut. Metode yang digunakan yaitu studi literatur atau studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini berpotensi meningkatkan kehadiran siswa, memperbaiki fokus siswa dalam pembelajaran, serta mengurangi beban ekonomi keluarga. Namun, masih terdapat berbagai kendala, seperti ketidaksesuaian kebijakan, perencanaan dan sumber daya yang belum optimal, banyaknya permasalahan dalam proses implementasi, dan dampak yang dihasilkan bagi negara dan masyarakat. Program yang awalnya menjadi harapan solusi efektif, justru menghadapi berbagai masalah serius. Kenyataan tersebut tidak hanya merusak kredibilitas pemerintah, tetapi juga memperpanjang persoalan gizi buruk yang seharusnya sudah teratasi. Dengan demikian, strategi kebijakan yang kuat diperlukan guna menjamin efektivitas dan keberlanjutan program.

Kata kunci: Program Makan Bergizi Gratis, Pelaksanaan Kebijakan, Siswa



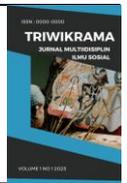
1. LATAR BELAKANG

Negara memiliki kewajiban dalam melindungi hak-hak warga negaranya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal tersebut merupakan hak-hak warga negara yang perlu dipenuhi oleh negara. Kesejahteraan rakyat dipegang penting oleh peranan kependudukan. Dinamika jumlah, distribusi, dan komposisi penduduk memiliki dampak langsung terhadap berbagai dimensi kehidupan sosial, ekonomi, serta proses pembangunan. Dalam pembangunan, kesehatan merupakan pilar utama yang akan memengaruhi berbagai aspek kehidupan dan keberlanjutan sebuah negara. Setiap sektor pembangunan, seperti ekonomi, sosial, keamanan, dan pendidikan memerlukan dukungan aspek kesehatan agar dapat berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan merupakan isu yang penting dalam pembangunan.

Pemenuhan gizi melalui asupan makanan yang cukup secara kualitas yang memadai berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang produktif dan berkualitas. Pemenuhan gizi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan individu. Namun, gizi kronis di Indonesia masih menjadi permasalahan penting yang perlu diperhatikan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI tahun 2024, angka stunting di Indonesia mencapai 21,6%, jauh di atas target nasional yang ditetapkan yaitu sebesar 17%. Malnutrisi terjadi ketika asupan nutrisi tidak seimbang dengan kebutuhan tubuh, baik berlebih maupun kurang, yang dapat mengakibatkan kelebihan gizi, kekurangan gizi, atau gizi buruk. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), pada tahun 2022 terdapat 21,60% balita yang mengalami stunting. Hal ini menunjukkan adanya penurunan angka stunting pada tahun sebelumnya yang mencapai 24,40%. Pada tahun 2024, prevalensi stunting nasional kembali mengalami penurunan menjadi 19,8% atau setara dengan 4.482.340 balita. Akan tetapi, masalah gizi masih menjadi tantangan besar di Indonesia, terutama pada anak-anak dan remaja. Perlu adanya upaya berkelanjutan dalam peningkatan gizi masyarakat. Penguatan koordinasi antar semua pihak merupakan hal yang sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat secara terus-menerus. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditujukan untuk anak sekolah, balita, dan ibu hamil. Tujuannya untuk meningkatkan asupan gizi dan mencegah stunting.

Program makan siang bergizi gratis merupakan program yang dirancang oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai bagian dari janji kampanye yang ditujukan untuk menjangkau sekitar 83 juta penerima manfaat, termasuk anak sekolah, balita, dan ibu hamil, dengan perkiraan anggaran mencapai Rp100 triliun pada tahun pertama dan dapat meningkat hingga Rp460 triliun pada tahun 2029. Program ini memiliki tujuan untuk memberikan makanan bergizi guna menunjang kesehatan dan pendidikan anak. Hal tersebut dimaksudkan dapat berkontribusi dalam penurunan angka stunting serta meningkatkan partisipasi sekolah di kalangan keluarga miskin. Selain itu, program ini diadakan untuk membangun generasi yang sehat, unggul dalam daya saing, pintar, dan dapat berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas ekonomi sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Fokus program ini yaitu peningkatan standar gizi anak-anak yang tinggal di daerah terpencil.

Banyaknya anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuat beberapa pihak kurang setuju dengan adanya program ini. Kekhawatiran muncul karena program ini bergantung pada APBN, sementara ruang fiskal ini tergolong sempit. Hal ini akan berdampak pada perhitungan anggaran, mulai dari penyesuaian nilai konversi rupiah hingga kemungkinan perubahan skema tahap pelaksanaan program (Dwijayanti, 2024).



Selain itu, juga berpotensi menambah beban APBN karena perlunya subsidi tambahan untuk menutupi selisih biaya yang timbul akibat lonjakan harga bahan pokok atau tingginya biaya distribusi. Dalam sejumlah kajian akademis, program ini dinilai memiliki dampak positif dan negatif, baik yang tampak secara tersurat maupun tersirat dalam pengimplementasiannya. Program makan gratis bermanfaat di bidang kesehatan, khususnya bagi anak dan remaja. Kesehatan pada kelompok usia tersebut sangat dipengaruhi oleh kecukupan asupan gizi, jika asupannya kurang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti gangguan fungsi organ tubuh dan penurunan performa belajar di sekolah (Chilot at al, 2023 dalam Welasari at al, 2025). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan yang dihasilkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar dapat menjadi suatu pertimbangan dalam keberlanjutan pelaksanaan program tersebut.

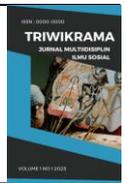
2. KAJIAN TEORITIS

Program makan siang gratis yang diterapkan di berbagai negara telah terbukti memberikan dampak positif terhadap kesehatan dan pendidikan anak-anak. Amerika Serikat misalnya, melalui program ini nilai matematika dan bahasa anak-anak di sana mengalami kenaikan. Di India, program serupa turut berkontribusi dalam meningkatkan otonomi perempuan di dalam rumah tangga. Data *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics* 2023 menyatakan bahwa anak-anak yang menerima makanan gratis berpeluang lebih tinggi memiliki ketahanan pangan dan kesehatan yang lebih baik. Sama halnya menurut Brookings Institution tahun 2021, makanan gratis berpeluang lebih tinggi memiliki ketahanan pangan dan kesehatan yang lebih baik. Menurut beberapa ahli, seperti M. Rizki Pratama dan Alexander Michael Tjahjadi menyatakan bahwa meskipun program ini memiliki efek ganda yang mendorong nilai tambah dan produktivitas lokal, belum ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi signifikan dapat dicapai hanya melalui program makan siang gratis (Rahmawati, 2024).

Pendekatan evaluatif dengan model CIPP (Context, Input, Process, Product) menurut Stufflebeam menjadi landasan dalam penelitian ini. Sebab dapat memberikan evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Model ini dianggap sesuai untuk menilai keberhasilan kebijakan secara menyeluruh, mulai dari tahap perumusan hingga hasil pelaksanaannya. Pendekatan ini dapat membantu peneliti dalam mengevaluasi kesesuaian konteks kebijakan program MBG, mengkaji perencanaan dan input sumber daya yang disediakan pemerintah, menilai proses implementasi program, dan mengukur produk serta dampak program terhadap kehidupan masyarakat. Dengan begitu, dapat diperoleh hasil yang mendalam dan objektif terkait keberlanjutan program tersebut. Tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan program sejak awal hingga pelaksanaan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau studi kepustakaan. Studi literatur adalah proses yang digunakan dalam suatu penelitian dengan melakukan tinjauan umum dari berbagai karya literatur yang diterbitkan sebelumnya terkait macam-macam topik. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengumpulkan data dan menganalisis informasi awal dari berbagai sumber yang relevan dan kredibel tanpa harus turun langsung ke lapangan, tetapi tetap dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bersifat ilmiah sesuai dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh berasal dari berbagai sumber literatur, seperti jurnal, website, buku, dan sumber literatur lainnya. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari tiga tahapan yaitu pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Nasution, 2023). Data yang digunakan dikaji, diidentifikasi, dan dievaluasi, lalu dijelaskan berdasarkan hasil temuan



dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Hasilnya, kesimpulan disampaikan berdasarkan data yang telah diolah tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks: Kesesuaian Kebijakan

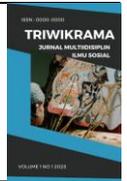
Program Makan Bergizi Gratis merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Program ini masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional yang diatur pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029. Badan Gizi Nasional berlaku sebagai koordinator dalam pelaksanaan program ini. Program ini mempunyai pertimbangan mendasar terkait kecukupan gizi untuk tumbuh kembang anak, stunting, skor IQ, rata-rata jumlah anggota keluarga per kelas ekonomi rumah tangga, hingga lama sekolah. Tujuan diluncurkannya program ini yaitu untuk mengatasi masalah gizi buruk dan stunting di Indonesia, sekaligus mendukung tumbuh kembang anak-anak, kesehatan ibu hamil dan ibu menyusui, serta meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air.

Berdasarkan hasil temuan, regulasi dan petunjuk teknis pada program Makan Bergizi Gratis masih perlu diperjelas. Regulasi program MBG yang ada saat ini adalah Surat Keputusan Deputi Bidang Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Operasional MBG. Penelitian CISDI mengatakan bahwa petunjuk teknis tersebut belum mengatur secara rinci operasional program MBG, seperti standar kebersihan, keamanan pangan, pengadaan bahan, pengemasan, suplai, hingga penyaluran makanan. Akses terhadap dokumen-dokumen mengenai ketersediaan regulasi dan petunjuk teknis masih sangat terbatas. Padahal, ketersediaan regulasi dan petunjuk teknis menjadi hal yang penting untuk kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta mitra strategis lainnya agar dapat berperan aktif dalam pelaksanaan program tersebut. Regulasi program makan gratis atau free school meals di negara lain, seperti India, Brasil, dan Jepang sudah setingkat undang-undang. Penetapan regulasi dalam bentuk Undang-Undang diperlukan karena akan memiliki dasar hukum yang mengikat secara nasional dan lintas pemerintah, serta lebih sulit untuk diubah atau dibatalkan secara sepihak. Selain itu, UU dapat menjamin keberlanjutan dalam jangka panjang, alokasi anggaran lebih terjamin, dan kontrol serta evaluasi akan lebih ketat.

Dilihat dari tujuan pelaksanaannya, program ini masih ditemukan beberapa kelemahan. Misalnya, untuk memenuhi kecukupan gizi dan nutrisi yang baik, digunakan Angka Kebutuhan Gizi (AKG) yang mengacu pada Permenkes No. 28 Tahun 2019. Namun, pada beberapa sekolah ditemukan bahwa menu makan siang program ini tidak memenuhi standar AKG. SMP 12 Semarang contohnya, menu yang disediakan berupa nasi putih 150 gram, telur rebus 55 gram, tempe bacem 25 gram, sayur asem 30 gram, dan semangka 80 gram. Hal ini menunjukkan total asupan energi hanya mencapai 379,9 kkal. Angka tersebut terbilang jauh di bawah standar juknis BGN, yaitu 719 kkal atau setara 30-35% dari AKG. Jika diakumulasikan, total energi dari makanan tersebut masih mengalami defisit sebesar 339,1 kkal. Sementara itu, kandungan protein yang ada yaitu 14,3 gram, lemak 11 gram, dan karbohidrat 55,4 gram. Hal tersebut juga masih mengalami defisit sebesar 20,5 gram protein dan 19,7 gram lemak, sedangkan karbohidrat surplus sebesar 24,6 gram.

Input: Perencanaan dan Sumber Daya

Keterlibatan Badan Gizi Nasional dalam program ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tidak hanya menyediakan makanan, tetapi juga memastikan distribusi makanan yang bergizi dan seimbang. Hal ini krusial, khususnya untuk anak-anak sekolah dan balita sebagai kelompok yang rentang terhadap masalah gizi. Badan Gizi Nasional ditunjuk sebagai koordinator program ini untuk memastikan pemenuhan gizi nasional, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam penyediaan menu makanan MBG telah melibatkan ahli gizi dan pekerja mitra yang berasal dari siswa tata boga. Hal tersebut



dilakukan untuk memastikan makanan memenuhi SOP dari Badan Gizi Nasional. Standar gizi yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional juga telah diatur kandungan gizinya berdasarkan usia dan tingkat sekolah anak.

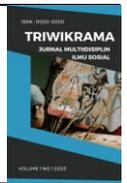
Namun, dilihat dari kasus sebelumnya, menimbulkan keraguan bahwa penyedia MBG telah benar-benar berafiliasi dengan ahli gizi. Sebab, perhitungan zat gizi makanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang konsen dalam bidang tersebut. Hal ini menimbulkan adanya dugaan bahwa masih ada di antara para mitra yang tidak bekerja sama dengan ahli gizi. Penyedia layanan makanan hanya berpatokan pada biaya per porsi makanan yang ditetapkan yaitu sebesar Rp8.500. Salah satu cara mencegah stunting adalah pemenuhan gizi serta nutrisi yang cukup. Jika tidak mencukupi, akan menyebabkan angka stunting terus mengalami kenaikan. Stunting mengakibatkan penurunan kapasitas intelektual dan gangguan pertumbuhan otak pada anak sehingga pencegahan stunting sejak dini menjadi hal yang penting.

Anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan program ini sangat besar. Pemerintah memerlukan 800 Milyar per hari untuk menjalankan program MBG dan ini cukup mengkhawatirkan terkait besarnya anggaran yang akan dikeluarkan di masa yang akan datang hanya untuk satu program (Aji, 2025). Ahli Gizi Universitas Gadjah Mada, Toto Sudargo dalam Kompas.com mengatakan bahwa porsi dan anggaran yang besar untuk program Makan Bergizi Gratis berpotensi sia-sia jika tidak diiringi dengan manajemen dan kontrol yang efektif. Pandangan ini menjelaskan bahwa alokasi Rp10.000 per porsi makanan secara sekilas memang terlihat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi individu anak-anak. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia di dapur menjadi salah satu kendala dalam program ini. Contohnya, di Pesantren Persatuan Islam Tarogong Kabupaten Garut ditemukan bahwa hanya empat orang tenaga dapur yang bertanggung jawab menyiapkan makanan untuk ratusan santri. Jumlah tersebut sangat tidak seimbang dengan beban kerja yang ada, sehingga menimbulkan tekanan tinggi pada tim pelaksana. Kekurangan tenaga kerja memengaruhi efisiensi waktu kerja dan kualitas penyajian makanan, serta berpotensi menyebabkan kelelahan fisik yang berdampak pada produktivitas jangka panjang. Apabila kondisi ini terus berlanjut tanpa penambahan tenaga kerja atau dukungan logistik, maka keberlanjutan program dapat terancam.

Proses: Implementasi Program

Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak terutama dari keluarga tidak mampu mendapatkan makanan yang bergizi. Hal ini mengurangi rasa khawatir tentang kelaparan di sekolah, sehingga tingkat absensi berkurang dan konsentrasi serta partisipasi pada pembelajaran meningkat. Selain itu, juga membantu menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung kesejahteraan mental dan emosional anak-anak. Tidak hanya memberikan jaminan mengenai asupan gizi yang memadai, tetapi juga mengurangi beban biaya hidup yang signifikan. Beban ekonomi keluarga berkurang karena tidak lagi mengalokasikan dana tambahan untuk membeli makan siang anak-anak mereka.

Namun, dalam pengimplementasian program ini ditemukan beberapa masalah yang cukup krusial. Kurangnya pengawasan dalam penyaluran dana MBG dari BGN ke yayasan-yayasan MBG, memungkinkan terjadinya minim transparansi dana yang merugikan dapur MBG. Seperti kasus yang dialami dapur MBG di Kalibata yang mengalami kerugian hingga berhenti beroperasi akibat tidak memperoleh biaya operasional dari yayasan yang telah disalurkan oleh BGN. Hal ini menunjukkan kurangnya pengawasan terhadap transparansi penyaluran dana MBG. Menurut ekonom, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% melalui program MBG patut dipertanyakan. Sebab realisasi anggarannya masih sangat rendah yaitu sebesar 2,04% dari Rp71 triliun per April 2025. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) realisasi anggaran MBG yaitu sebesar Rp1,44 triliun per 16 April 2025. Realisasi anggaran tersebut diberikan kepada 3,02 juta penerima manfaat melalui 1.079 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Keterlambatan realisasi



program ini mengakibatkan hilangnya momentum serta tertundanya manfaat langsung terhadap ekonomi keluarga dan penciptaan lapangan kerja lokal. Dalam hal tersebut, kebijakan MBG dirasa masih bersifat sentralistis, sehingga hanya memberikan stimulus kepada kelompok tertentu.

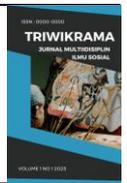
Adapun kasus 40 siswa keracunan di Sukoharjo setelah mengkonsumsi makanan basi yang didistribusikan dalam program MBG. Hal serupa juga terjadi di Nunukan, Kalimantan Utara, terdapat sejumlah anak dirawat akibat mengkonsumsi makanan basi yang tidak memenuhi standar gizi (Widyastuti, 2025). Pada tanggal 5 Mei 2025, Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kabinet mengatakan bahwa terdapat sekitar 200 orang dari 3 juta lebih penerima mengalami keracunan. Kasus-kasus tersebut menandakan bahwa program ini gagal terencana dengan matang. Seharusnya program ini diawali dengan riset yang mendalam mengenai kebutuhan dan kapasitas distribusi. Namun, dalam pelaksanaannya, distribusi makanan seringkali dilakukan tanpa memperhatikan waktu penyimpanan, kualitas bahan baku, maupun keamanan dalam proses pengolahan. Pernyataan pemerintah mengenai berhasilnya pencegahan makanan terkontaminasi sebelum dikonsumsi oleh masyarakat, justru mempertegas bahwa pengawasan masih lemah dan proses evaluasi belum mencapai permasalahan yang mendasar. Hal ini tentunya mempertaruhkan kepercayaan masyarakat terhadap lanjutnya program tersebut.

Produk: Dampak Program

Hasil riset menjelaskan bahwa dampak dari program MBG akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia dalam jangka waktu panjang terutama mempersiapkan generasi emas tahun 2045 (Media Keuangan, 2025) dalam (Aji, 2025). Program MBG menunjukkan dampak nyata dalam implementasinya. Sebagai contoh, di SDN 03 Warungkiara, Sukabumi, pemerintah menyatakan bahwa program MBG secara signifikan meningkatkan tingkat kehadiran siswa. Berdasarkan hasil risetnya, persentase kehadiran yang semula berkisar 70-80% sebelum program MBG, meningkat menjadi 100% setelah program ini dilaksanakan. Implementasi program MBG di Pondok Pesantren Persatuan Islam Tarogong Kabupaten Garut juga mendapatkan dampak positif, program ini membantu kebutuhan dasar santri sehingga fokus belajar santri meningkat dan meringankan beban ekonomi orang tua mereka (Setiawan et al, 2025).

Dikutip dari Media Indonesia (9/1/2025), peneliti Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Elixia Mardian mengatakan bahwa program MBG memiliki multiplier effect. Salah satunya yaitu terciptanya lapangan pekerjaan dan pangsa pasar baru untuk masyarakat lokal sekitar dapur. Pembentukan dapur sehat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan mengangkat perekonomian daerah karena bahan-bahan yang digunakan dari produk lokal. Dikutip dari Radar Lombok (10/4/2025), sejak Januari 2025 sudah terdapat 191 Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi dan melayani sekitar 3.000 penerima manfaat di setiap titik. Setiap unit atau satuan kerja menerima alokasi dana tahunan sekitar Rp8 sampai Rp10 Miliar. Dari jumlah tersebut, 85% anggaran dialokasikan untuk pembelian bahan baku, dan 95% dari bahan baku tersebut bersumber dari produk pertanian lokal. Berdasarkan pernyataan Badan Gizi Nasional dalam Tempo (16/4/2025), pekerja SPPG memperoleh gaji sebesar Rp2 juta per bulan. Hal ini membantu banyak ibu rumah tangga, terutama usia 40-45 tahun yang sebelumnya tidak berpenghasilan.

Namun, dampak negatif dari program ini juga diperoleh saat pengimplementasiannya. Besarnya anggaran yang diperlukan dalam program MBG menyebabkan dilakukannya efisiensi anggaran, terutama pada beberapa kementerian/lembaga. Penghematan APBN tersebut ditargetkan mencapai Rp306 Triliun. Efisiensi anggaran dilakukan terhadap 16 pos belanja, seperti pembelian alat tulis kantor, perjalanan dinas, sewa kendaraan, sampai kegiatan seremonial. Efisiensi yang dilakukan tentunya akan berpengaruh pada program-program kerja di instansi-instansi tersebut karena terbatasnya biaya. Beberapa dampak akibat efisiensi



anggaran 2025, yaitu penerapan sistem work from anywhere (WFA) pegawai BKN dan Kemenkes, berkurangnya layanan BMKG yang membuat banyak alat operasional utama berpotensi mati, pengurangan karyawan RRI, pembatalan proyek infrastruktur Kemen PU mulai dari pembelian alat baru hingga pengurangan dana tanggap darurat, gaji dan tunjangan Mahkamah Konstitusi tidak dibayar, seleksi calon hakim agung oleh Komisi Yudisial terhenti, anggaran riset BRIN dan Kemendikti Saintek dipangkas, Ombudsman tidak dapat bekerja secara maksimal, serta kualitas layanan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menurun.

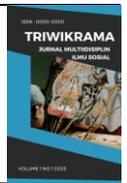
Menurut Dosen FEB UGM, Akhmad Akbar Susanto, Ph.D, pemangkasan yang dilakukan di sektor-sektor produktif seperti infrastruktur pokok, pendidikan, dan kesehatan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Sektor-sektor tersebut memberikan dampak multiplikatif yang besar terhadap perekonomian. Apabila pemangkasan anggaran tidak dilakukan secara selektif akan beresiko menurunkan investasi publik, menghambat penciptaan lapangan kerja, serta melemahkan produktivitas tenaga kerja. Pemangkasan anggaran yang terlalu agresif di sektor sosial akan menyebabkan daya beli masyarakat menurun sehingga konsumsi domestik menurun dan pemulihan ekonomi melambat.

Adanya keterlambatan pembayaran kepada relawan menyebabkan dapur makan bergizi gratis terpaksa tutup (Suryadi, 2025 dalam CNBC Indonesia, 2025). Salah satunya dapur di Kalibata, menu makanan sudah dimasak dan siap didistribusikan, tetapi tidak bisa dikirimkan lantaran biaya untuk pengoperasian dapur tidak ada. Diketahui dalam Kompas.com (17/4/2025), kerugian yang diperoleh mencapai hampir Rp1 miliar karena belum dibayar. Selain merugikan para relawan, juga banyak membuang-buang makanan secara sia-sia. Padahal, seharusnya program ini memberikan manfaat bagi anak-anak, tetapi sebaliknya mereka tidak mendapatkan apa-apa.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun pertama 2025 tercatat bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia menurun dari proyeksi sebelumnya menjadi 4,87%. Inflasi yang terus naik dan aktivitas di sektor produktif mulai menunjukkan tanda-tanda kelesuan. Program ini dianggap akan menguras anggaran negara tanpa memperoleh dampak nyata dalam jangka pendek. Menurut, ekonom senior Faisal Basri, fokus pemerintah sebaiknya dialihkan ke sektor-sektor yang lebih produktif. Hal ini berarti menginvestasikan sumber daya dan upaya pada bidang-bidang yang bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat. Tanpa pengelolaan yang transparan dan keberlanjutan pendanaan, program ini dapat dengan mudah mengalami kegagalan. Namun, di Indonesia justru terjebak dalam kekacauan yang bisa diprediksi. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan menjadi solusi konkret, justru menghadapi kendala logistik, distribusi yang tidak teratur, dan kualitas makanan yang tidak memenuhi standar.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang diluncurkan oleh pemerintah dengan tujuan meningkatkan asupan gizi dan mencegah stunting. Program ini diadakan sebagai bentuk upaya dalam membangun generasi yang sehat, unggul dalam daya saing, pintar, dan dapat berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas ekonomi sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dengan pendekatan evaluatif model CIPP menurut Stufflebeam diperoleh hasil untuk menilai keberhasilan kebijakan tersebut. Pada indikator konteks, ditemukan bahwa regulasi dan petunjuk teknis pada program MBG masih perlu diperjelas. Selain itu, juga terdapat ketidaksesuaian AKG menurut ketentuan BGN dalam pelaksanaannya. Pada indikator input, ditemukan bahwa adanya keraguan penyedia MBG belum benar-benar terafiliasi dengan ahli gizi dan besarnya anggaran yang mengkhawatirkan. Pada indikator proses, ditemukan bahwa masih kurangnya pengawasan dan proses evaluasi belum mencapai akar permasalahan. Pada indikator produk, ditemukan bahwa terdapat dampak

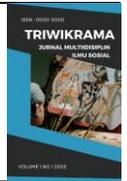


positif dan negatif. Dampak positif dari program ini yaitu memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan konsentrasi belajar, dan meringankan beban ekonomi keluarga. Sementara itu, dampak negatifnya adalah membutuhkan dana yang besar dan mengancam efisiensi sektor produktif, mitra mengalami kerugian, serta makanan terbuang sia-sia. Program Makan Bergizi Gratis yang awalnya menjadi harapan solusi efektif, tetapi justru menghadapi berbagai masalah serius. Isu-isu seperti makanan basi, keterlambatan distribusi, dan manajemen yang tidak memadai telah menciptakan ketidakpastian yang memperparah kondisi. Kenyataan tersebut tidak hanya merusak kredibilitas pemerintah, tetapi juga memperpanjang persoalan gizi buruk yang seharusnya sudah dapat teratasi. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan program ini memerlukan strategi kebijakan yang lebih kuat guna menjamin efektivitas dan keberlanjutan program.

Berdasarkan hasil temuan, maka perlu adanya perbaikan dan pengoptimalan regulasi oleh pemerintah, termasuk memperjelas tugas pokok dan fungsi, serta meningkatkan koordinasi antar sektor terkait dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Badan Gizi Nasional perlu membuat petunjuk teknis yang rinci dan terstandarisasi, yang harus dipatuhi oleh pemerintah daerah dan seluruh mitra program untuk memastikan bahwa program berjalan dengan baik. Penerapan program sebaiknya diprioritaskan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, serta daerah dan sekolah dengan tingkat food insecurity tertinggi. Pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan spesifik wilayahnya, maka pendekatan desentralisasi dapat menjadi pilihan yang efektif. Hal ini memungkinkan UMKM lokal untuk mendapatkan akses ke pasokan makanan sehingga menghasilkan rantai pasokan yang lebih efisien dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Aji, T. W. (2025). Makan Bergizi Gratis di Era Prabowo-Gibran: Solusi Untuk Rakyat atau Beban Baru?. *Naafi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(2), 300-311. <https://doi.org/10.62387/naafijurnalilmiahmahasiswa.v2i2.134>
- Alfisyahri, K. (2025, 9 Mei). Catatan Kritis Terhadap Program Makan Bergizi Gratis. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20250509141534-14-632444/catatan-kritis-terhadap-program-makan-bergizi-gratis>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024*.
- Bloombergtechnoz. (2025, 18 April). Ekonom: Realisasi Program MBG Minim, Tak Optimal Genjot Ekonomi. *Bloomberg Technoz*. <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/68779/ekonom-realisasi-program-mbg-minim-tak-optimal-genjot-ekonomi>
- Dwijayanti, A. (2024). Policy Spillover: Analisis Jaringan Dampak Kebijakan Makan Siang Bergizi Gratis terhadap Sektor Pertanian. *Jurnal Administrasi Publik*, 20(2), 281-308. <https://doi.org/10.52316/jap.v20i2.435>
- Kemendagri. (2025, 2 Mei). Prevalensi Stunting Tahun 2024 Turun Jadi 19,8 Persen Pemerintah Terus Dorong Penguatan Gizi Nasional. *KEMENKO PMK*. <https://www.kemendagri.go.id/prevalensi-stunting-tahun-2024-turun-jadi-198-persen-pemerintah-terus-dorong-penguatan-gizi#:~:text=02%20May%2C%202025-,Prevalensi%20Stunting%20tahun%202024%20Turun%20Jadi%2019%2C8%20Persen%2C%20Pe,Prevalensi%20Stunting%20tahun%202024%20Turun%20Jadi%2019%2C8%20Persen%2C%20Pe>
- Kiftiyah, A., Palestina, F. A., Abshar, F. U., & Rofiah, K. (2025). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial-Politik. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 5(1), 101-112. <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.726>
- Maharani, P. A., Namira, A. R., & Chairunnisa, T. V. (2024). Peran makan siang gratis dalam janji kampanye prabowo gibran dan realisasinya. *Journal Of Law And Social Society*, 1(1), 1-10. <https://doi.org/10.70656/jolasos.v1i1.79>



- Media Indonesia. (2025, 9 Januari). Program Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Nyata Bagi Bangsa. *Media Indonesia*. <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/program-makan-bergizi-gratis-beri-dampak-nyata-bagi-bangsa>
- Nugroho, A. (2025, 11 Maret). Program MBG Dinilai Berisiko Pemborosan, Sebaiknya Diprioritaskan Pada Anak Keluarga Kurang Mampu. *Ugm.ac.id*. <https://ugm.ac.id/id/berita/program-mbg-dinilai-berisiko-pemborosan-sebaiknya-diprioritaskan-pada-anak-keluarga-kurang-mampu/>
- Prawira, E. A. (2024, 20 Agustus). Kemenkes RI Mulai Survei Status Gizi Indonesia 2024, Target Turunkan Stunting dari 21 Persen ke 14 Persen. *Liputan 6*. <https://www.liputan6.com/health/read/5678497/kemenkes-ri-mulai-survei-status-gizi-indonesia-2024-target-turunkan-stunting-dari-21-persen-ke-14-persen?page=2>
- Purwowidhu, CS. (2025, 17 Februari). Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Dinamika dan Sorotan. *Media Keuangan*. [https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/program-makan-bergizi-gratis-mbg-dinamika-dan-sorotan#:~:text=Regulasi%20dan%20tata%20kelola&text=Berdasarkan%20penelitian%20CIS DI%2C%20regulasi%20MBG,teknis%20\(juknis\)%20operasional%20MBG.](https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/program-makan-bergizi-gratis-mbg-dinamika-dan-sorotan#:~:text=Regulasi%20dan%20tata%20kelola&text=Berdasarkan%20penelitian%20CIS DI%2C%20regulasi%20MBG,teknis%20(juknis)%20operasional%20MBG.)
- Puspapertiwi, R. E., & Dzulfaroh, N. A. (2025, 17 April). 5 Fakta Dapur MBG Kalibata Tutup Usai Rugi Hampir Rp1 M. *Kompas*. <https://www.kompas.com/tren/read/2025/04/17/143000965/5-fakta-dapur-mbg-kalibata-tutup-usai-rugi-hampir-rp-1-m?page=all#>
- Puspita, D. M. (2025, April 22). Kisaran Gaji Pekerja MBG yang Disebut BGN Tak Dipotong BPJS Ketenagakerjaan. *Tempo*. <https://www.tempo.co/ekonomi/kisaran-gaji-pekerja-mbg-yang-disebut-bgn-tak-dipotong-bpjs-ketenagakerjaan-1234330>
- Qomarrullah, R., Suratni., Wulandari, L., & Sawir, M. (2025). Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Kesehatan dan Keberlanjutan Pendidikan. *Indonesian Journal of Intellectual Publication (IJIPublication)*, 5(2), 130-135. <https://doi.org/10.51577/ijpublication.v5i2.660>
- Radarlombok.co.id. (2025, 10 April). Program Makan Bergizi Gratis Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *Radarlombok.co.id*. <https://radarlombok.co.id/program-makan-bergizi-gratis-dorong-pertumbuhan-ekonomi-nasional.html>
- Rahmawati, N. A., Prasetyo, A. S., & Ramadhani, W. M. (2024). Memetakan Visi Prabowo Gibran Pada Masa Kampanye Dalam Perspektif Pembangunan. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(3), 96-120. <https://doi.org/10.62383/wissen.v2i3.176>
- Savitri, D. (2024, 24 Oktober). Makan Bergizi Gratis Ada di Bawah Badan Gizi Nasional, Kemendikdasmen Jadi Mitra. *Detik.com*. <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-7604823/makan-bergizi-gratis-ada-di-bawah-badan-gizi-nasional-kemendikdasmen-jadi-mitra#>
- Septiani, F. I., Rosiana, N., & Azzahra, A. (2024). Dampak Makan Siang Gratis Pada Kondisi Keuangan Negara Dan Peningkatan Mutu Pendidikan. *JUPENSAL: Jurnal Pendidikan Universal*, 1(2), 191-196.
- Setiawan, A., Purwanti, H., Maulani, H. C., Anggraeni, F. N., & Gaffar, M. A. (2025). Analisis Kebijakan SE Dirjen Pendis No. 10 Tahun 2024 Panduan Program Makan Bergizi Gratis di Lingkungan Pesantren: Implikasi terhadap Motivasi Belajar Santri. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 5(2), 341-355. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.5796>
- Welasari., Gunadi, A. G., Raharjo, S. J., Setianingsih, S., & Amazihono, M. (2025). Analisis Kemanfaatan Kebijakan Program Makan Siang Gratis bagi Peserta Didik dan Pemerintah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 7403-7411.